

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemekaran wilayah pemerintahan merupakan suatu langkah strategis yang ditempuh oleh Pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan baik dalam rangka pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan menuju terwujudnya suatu tatanan kehidupan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, adil dan makmur. Dengan perkataan lain, hakikat pemekaran daerah otonom lebih ditekankan pada aspek mendekatkan pelayanan pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemekaran daerah merupakan cara atau pendekatan untuk mempercepat akselerasi pembangunan daerah dan daerah otonom baru, sebagai kesatuan geografis, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Secara normatif pembentukan suatu daerah otonom baru dapat diadakan oleh Pemerintah antara lain melalui pemekaran daerah otonom. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam pasal 4 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang secara teknis operasional berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 129 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.

Berbicara tentang pokok-pokok kebijaksanaan pembangunan desa, kita tidak dapat mengabaikan pengertian, latar belakang, pendekatan konsep maupun kenyataan-kenyataan kondisi masyarakat di daerah yang berbeda-beda, sekaligus dikaitkan pula dengan masalah keterpaduan yang sangat penting artinya bagi

pembangunan desa yang harus dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan terkoordinasikan karena pada dasarnya desa merupakan bagian yang sangat vital bagi keberadaan bangsa Indonesia. Vital karena desa merupakan satuan terkecil dari bangsa ini yang menunjukkan keragaman bangsa Indonesia.

Selama ini terbukti keragaman tersebut menjadi kekuatan penyokong bagi tegak dan eksisnya bangsa. Dengan demikian, penguatan desa menjadi hal yang tidak bisa ditawar dan tidak bisa dipisahkan dari pembangunan bangsa secara menyeluruh. Artinya, pembangunan masyarakat desa adalah menjadi urusan pemerintah dan warga negara yang bersangkutan.

Visi menuju otonomi desa pada dasarnya menghendaki adanya usaha pengembangan masyarakat swadaya dan mandiri. Kemampuan untuk mengurus urusan mereka sendiri adalah keswadayaan desa dan kemandirian desa sehingga pada akhirnya desa tidak lagi selalu tergantung pada pemerintahan yang lebih tinggi.

Pasca adanya otonomi daerah, setiap daerah pada dasarnya dituntut untuk lebih mandiri dalam mengatur pemerintahannya. Hal ini sesuai dengan asas desentralisasi dimana setiap daerah diberi hak dan wewenang untuk mengatur jalannya pemerintahan sesuai dengan kondisi yang ada dalam masyarakat. Pembangunan pun seharusnya didasarkan pada kebutuhan dasar dari masyarakat itu sendiri sehingga efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah dapat tercapai, dengan demikian kesejahteraan masyarakat bukan sekedar wacana melainkan sesuatu yang konkret yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Desa Toraut merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow yang memiliki luas wilayah yang cukup untuk melakukan pemekaran, dengan topografi wilayah yang keseluruhannya adalah dataran dengan tekstur tanah yang cukup subur, sehingga sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani.

Luas wilayah Desa Toraut tersebut membuat masyarakat yang terletak di bagian Dusun IV dan V untuk membentuk daerah otonomi Desa Baru dalam rangka mengatur dan mengurus wilayah dan rumah tangganya sendiri berdasarkan kemampuan dan potensi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Selain alasan luas wilayah tersebut tentu terdapat beberapa alasan mendasar yang mendorong masyarakat untuk membentuk daerah otonom baru. Dugaan sementara penulis alasan yang lain adalah adanya campur tangan elit lokal baik elit politik maupun non politik.

Berbagai aktivitas dan kegiatan sosial masyarakat biasanya merupakan inisiatif dari tokoh elit desa. Elit desa juga berperan dalam mengontrol kebijakan pemerintah desa. Oleh karena itu, posisi elit dalam sebuah desa sangatlah strategis. Namun, karena setiap desa memiliki nilai, norma, dan budaya yang berbeda, maka macam aktor elit yang berperan dalam sebuah desa pun juga berbeda.

Elit yang secara implisit mempunyai pengaruh terhadap masyarakat, mampu menjustifikasi berbagai isu dan mendorong reaksi warga terhadap isu tersebut. Namun, elit pasti memiliki sumber daya untuk menjalankan pengaruhnya. Sumber daya tersebut dapat berupa jabatan, pendidikan, ekonomi

dan lainnya. Tentu saja, elit yang berperan di Desa Toraut Utara juga memiliki sumber daya strategis yang menjadi modal dalam mengelola pemekaran desa.

Konsistensi elit dalam pemekaran Desa Toraut Utara sangatlah tinggi, mulai dari memunculkan isu pemekaran, memobilisasi massa, dan mediasi dengan eksekutif,. Bahkan, berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu warga Toraut Utara, ternyata sebelum menjadi desa, elit nekat menjual (disewakan) sawah untuk membangun Kantor Balai Desa.

Pemekaran suatu daerah atau desa seharusnya lahir dari keinginan masyarakat yang telah dimusyawarakan dan di sepakati bersama dengan alasan mendasar untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga isu pemekaran yang di dengungkan akan mencapai tujuannya dan tidak akan terhenti pada kepentingan politik semata.

Hal lain yang perlu dikaji adalah seringkali isu pemekaran selalu muncul dari atas (kaum elit) yang juga lebih memberikan keuntungan bagi kaum elit, padahal banyak warga yang juga ikut dalam memperjuangkan pemekaran. Inilah yang akan menjadi tujuan penting dilakukannya penelitian ini.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis bermaksud mengadakan sebuah penelitian lewat penulisan skripsi yang dikemas dalam judul “Peran Elit Politik Dalam Pemekaran Desa. (Studi Kasus Di Desa Toraut Utara Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan, maka penelitian ini akan mengambil perumusan masalah sebagai berikut :

1.2.1 Bagaimanakah peran elit politik dalam pemekaran Desa Toraut Utara Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow?

1.2.2 Apa motivasi elit politik dalam pemekaran Desa Toraut Utara Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1.3.1 Untuk mengetahui peran elit politik dalam pemekaran Desa Toraut Utara Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow.

1.3.2 Untuk mengetahui motivasi elit politik dalam pemekaran Desa Toraut Utara Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat diadakannya penelitian ini adalah untuk memperluas pengetahuan tentang peran elit politik dalam pemekaran desa.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, manfaat penelitian ini adalah agar masyarakat mengetahui peranan elit politik dan berbagai motifnya dalam pemekaran desa.